

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT INVESTASI BANK PEMERINTAH NASIONAL PADA SEKTOR PERTANIAN

1.1 Latar belakang masalah

Tujuan pembangunan nasional jangka panjang II menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, agar pembangunan tersebut dapat berhasil. Untuk menggerakkan dana dan investasi, bank merupakan suatu media yang tepat yaitu melalui kegiatan perkreditan diberbagai jasa bank pada berbagai sektor ekonomi dan juga bank harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi antara lain, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat¹. Sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka bank dalam hal ini bank pemerintah nasional diharapkan mampu memberikan kredit terutama kredit investasi pada perorangan dan dunia usaha, sehingga iklim perekonomian di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pemerataan terus berusaha untuk menciptakan iklim yang memungkinkan sistem perkreditan nasional menjadi lebih kuat, efisien dan benar-benar mencerminkan mekanisme pasar. Untuk itu melalui berbagai deregulasi dan debirokratisasi, industri perbankan sebagai salah satu

¹ Republik Indonesia UU No 7/ 1992 pasal 3 Dan 4

unsur utama dalam sistem perkreditan nasional terus didorong untuk dapat meningkatkan efisiensinya, serta kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyaluran dananya kepada masyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang mengarah pada efisiensi secara nasional tersebut, diharapkan alokasi dana oleh industri perbankan dalam bentuk kredit perbankan benar-benar tersalur pada sektor yang produktif dan efisien, sehingga akan dapat meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa.

Mengacu pada prinsip yang menghendaki kebijaksanaan perkreditan perbankan benar-benar bertumpu pada kehidupan ekonomi yang sehat. Maka melalui kebijaksanaan paket Januari 1990 pemerintah antara lain telah mengurangi secara bertahap KLBI. Penyediaan KLBI secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang didasarkan pada arus dana yang dihimpun oleh masyarakat. Dalam jumlah yang sangat terbatas, KLBI tetap diberikan untuk mendukung upaya swasembada pangan, pengembangan koperasi dan peningkatan investasi².

Apabila dilihat menurut sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan dapat dikelompokkan kedalam enam sektor, yaitu industri, perdagangan, jasa, pertanian, pertambangan, dll. Dalam hal ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

² Nota keuangan dan RAPBN 1997, 1998

Tabel 1.1
 Jumlah kredit perbankan menurut sektor ekonomi
 Tahun 1988 - 1998
 (dalam miliar rupiah)

Th	Sektor					
	Per tanian	Per tambangan	Per Industrian	Per Dagangan	Jasa-jasa	Lain-lain
1988	4,311	388	15,683	14,697	6,996	2,879
1989	5,982	519	22,449	22,814	11,202	7,907
1990	7,629	645	31,313	29,590	17,114	13,398
1991	8,899	730	35,411	31,907	21,747	17,045
1992	10,127	724	43,473	32,534	25,874	11,435
1993	12,436	655	53,483	38,563	37,191	14,842
1994	14,291	954	62,967	45,364	52,378	20,195
1995	15,829	1,224	73,023	56,232	69,454	26,661
1996	18,849	2,738	81,234	73,462	96,503	33,343
1997	31,865	6,964	157,982	107,607	133,382	39,041
1998	29,810	5,556	133,283	71,705	90,981	29,209
1999	24,677	4,970	82,631	41,278	41,550	28,129
2000	23,386	5,666	92,431	47,802	44,329	32,412
Rata-rata	20.6 %	4.0 %	33.5 %	13.9 %	25.9 %	2.1%

Sumber : Nota Keuangan Dan RAPBN 2001

Dilihat dari sektor ekonomi pertumbuhan kredit pada umumnya mengalami perlambatan yang cukup tajam, kecuali pada sektor pertanian dan sektor perindustrian. Hingga Juli 2000, posisi kredit investasi berjumlah Rp 59,522 miliar, yang sebagian besar disalurkan untuk kegiatan disektor perindustrian sebesar Rp 21,189 miliar atau (33.5 %), sektor jasa-jasa sebesar Rp 15,395 miliar atau (25.9 %), dan sektor pertanian sebesar Rp 12,245 atau (20.6 %). Sedangkan kredit investasi yang disalurkan untuk sektor perdagangan dan sektor pertambangan masing-masing mencapai Rp 8.277 miliar atau (13.9 %) dan Rp 2.416 miliar atau (4.0 %) dan sektor lain-lain Rp 1.643 miliar atau (2.1%). Apabila dibandingkan dengan posisi Maret 2000 sebesar Rp 57.523 miliar maka kredit investasi meningkat Rp 1.999 miliar (3.5 %).

Peningkatan kredit sektor pertanian, disebabkan oleh peningkatan kredit pada bidang usaha perkebunan, dan sarana pertanian, pada sektor pertambangan kredit terutama disalurkan pada bidang usaha migas dan bidang lain-lain.

Sementara itu kredit dibidang usaha distribusi dan perdagangan eceran menjadi laju kredit disektor perdagangan, sedangkan sektor jasa, kredit diberikan kepada sektor real estate.

Sedangkan untuk kredit investasi menurut sektor ekonomi perkembangannya dapat dilihat di tabel :

Tabel 1.2

Posisi kredit investasi menurut sektor ekonomi pada berbagai kelompok bank
(dalam miliar Rupiah)

TH	Sektor					
	Pertanian	Pertambangan	Perindustrian	Perdagangan	Jasa	Lain-lain
1988	2,983	217	5243	869	1845	298
1989	3,715	251	6144	1254	2974	365
1990	4,417	372	7,448	1,785	3,867	453
1991	5,192	399	8,384	2,217	4,305	759
1992	6,664	381	10,741	2,639	5,627	875
1993	7,846	206	11,346	5,243	6,994	-
1994	8,956	129	13,004	3,853	8,343	-
1995	9,841	157	15,324	4,978	12,841	-
1996	11,010	310	15,102	7,116	17,287	-
1997	12,426	425	17,522	7,344	19,682	-
1998	13,443	408	24,819	7,471	28,732	-
1999	10,678	162	9,193	3,035	8,112	-
2000	8,684	1,861	7,324	3,492	7,536	-
2001	9,682	3,042	10,784	4,717	9,831	-

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah kredit investasi untuk sektor pertanian, perindustrian, jasa-jasa mengalami peningkatan tiap tahunnya sedangkan untuk sektor perdagangan, pertambangan dan lain-lain jumlah kredit yang dikeluarkan mengalami fluktuasi bahwa pada sektor lain-lain pada tahun-tahun tertentu tidak menerima kredit investasi.

Untuk perkembangan kredit investasi sektor pertanian dari berbagai kelompok bank perkembangannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Posisi kredit investasi sektor pertanian pada berbagai kelompok bank
Tahun 1988 - 2001
(dalam miliar Rupiah)

Tahun	Kelompok Bank			
	Bank Persero	Bank Pemerintah Daerah	Bank Swasta Nasional	Bank Campuran
1988	2,184	22	52	-
1989	3,174	30	128	-
1990	4,089	47	280	1
1991	4,845	54	293	-
1992	6,330	63	271	-
1993	7,460	55	306	25
1994	8,401	71	463	21
1995	9,055	90	684	12
1996	9,713	109	1165	23
1997	10,802	132	1470	22
1998	11,731	168	1529	15
1999	9,145	168	1360	5
2000	6,704	212	1591	177
2001	6,755	270	2619	38

Sumber Data : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Untuk kredit investasi sektor pertanian yang disalurkan di oleh berbagai kelompok bank dari tahun 1988 – 2001, jumlah kredit tersebut masih dipegang oleh bank pemerintah dari Rp 2.184 miliar menjadi Rp 6.755 miliar atau meningkat sebesar 79.78 %, kemudian bank swasta nasional dari Rp 52 miliar menjadi Rp 2619 miliar atau meningkat 94.46 %. untuk bank pemerintah daerah dari Rp 22 miliar menjadi Rp 270 miliar atau meningkat sebesar 83.33 % dan untuk bank asing dan campuran pada tahun 1990 kredit yang diberikan Rp 1 miliar kemudian periode berikutnya tidak memperoleh kredit, dan kredit tersebut diberikan lagi pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan tahun 2001 menjadi Rp 38 miliar mengalami fluktuasi. akan tetapi apabila dihitung dari pertahunnya mengalami penurunan sebesar 13.64 %.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang II, seperti yang disebutkan di atas yaitu menitik beratkan pada bidang ekonomi, maka perlunya dikembangkan sektor pertanian yang baik. yang ditandai oleh penataan dan

pemanfaatan sektor-sektor pertanian yang tangguh, modern, efisien, serta menguasai teknologi tinggi, padat modal dan nilai tambah yang mampu bersaing dengan sektor lain. Maka pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan disektor pertanian yang terdiri atas.

1. Program pokok yang meliputi program peningkatan produk pangan, peningkatan kesempatan kerja, dan produktifitas tenaga kerja pertanian, program pengembangan ekspor hasil pertanian serta program peningkatan produksi dan difersifikasi pertanian.
2. Program penunjang, meliputi program penelitian dan penyuluhan pertanian, program penelitian dan pengembangan pertanian³.

Untuk mendukung tercapainya kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanian tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai sektor, termasuk didalamnya sektor perbankan. Keterlibatan sektor perbankan merupakan tindakan yang penting dan perlu dilakukan guna mendukung dunia usaha. Dalam upaya mendorong perkembangan sektor pertanian, peran perbankan terutama bank pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan perkreditan sangat diperlukan. Untuk itu perbankan diharapkan mampu memanfaatkan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat untuk membiayai sektor usaha yang mendukung perkembangan pertanian. Dengan kredit yang diberikan diharapkan sektor pertanian dapat berkembang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia telah berlangsung kurang lebih selama 32 tahun, yang berarti kita telah memasuki tahap pembangunan jangka panjang tahap II. Evaluasi terhadap kebijakan moneter selama kurun waktu tersebut tentunya penting agar dapat mengantisipasi permasalahan yang dapat terjadi dimasa yang akan datang.

³ Laporan perekonomian Indonesia 1996 BPS Jakarta 1996

Berpijak dari latar belakang dan permasalahan serta pentingnya pengamatan terhadap sektor perbankan khususnya penyaluran kredit investasi pada bank pemerintah nasional, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PDB merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemberian kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.
2. Apakah tingkat inflasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemberian kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.
3. Apakah tingkat suku bunga kredit investasi berpengaruh terhadap pemberian kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian
4. Apakah paket kebijakan 29 Januari 1990 dapat berpengaruh terhadap pemberian kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen PDB, suku bunga kredit investasi bank-bank pemerintah, inflasi, dan variabel dummy (PAKET 29 Januari 1990) baik secara individu maupun bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kredit investasi bank-bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.
2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh paket kebijaksanaan pemerintah 29 Januari 1990 terhadap kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan dibidang moneter dalam kaitannya dengan kredit investasi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak yang bermaksud menjadikan penelitian pada masalah yang sama.
3. Sebagai bahan informasi dalam penentuan strategi untuk meningkatkan sektor pertanian melalui investasi bank.

1.5 Hipotesa Penelitian

Hipotesa-hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel PDB, suku bunga investasi bank-bank pemerintah, inflasi dan paket 29 Januari 1990 terhadap kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.

Sedangkan secara parsial hipotesa-hipotesa yang diajukan adalah :

1. Diduga tingkat suku bunga kredit investasi bank-bank pemerintah nasional akan berpengaruh secara negatif.
2. Sedangkan PDB diduga akan berpengaruh secara positif terhadap kredit investasi bank-bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.
3. Diduga inflasi yang terjadi akan berpengaruh secara negatif terhadap kredit investasi bank-bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.
4. Diduga paket 29 Januari 1990 akan berpengaruh terhadap pemberian kredit investasi yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah nasional pada sektor pertanian.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai penunjang dalam penelitian ini, antara lain hal-hal yang mengarah pada usaha mencari penjelasan yang lengkap mengenai pokok masalah.

1.6.2 Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Studi Pustaka diarahkan pada perolehan landasan teori yang digunakan dalam pembahasan masalah. Dasar dari literature-literatur yang ada dan analisa ini dimasukkan sebagai pendukung dalam analisa kualitatif.

1.6.3 Metode Analisis data

Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisa data dengan cara mendeskripsikan fenomena yang ada dengan mengacu pada teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan analisis ini dimasukkan sebagai pendukung dalam analisa kuantitatif. Sedangkan metode kuantitatif yaitu metode yang didasarkan pada perhitungan dan perbandingan angka-angka dari masing-masing variabel yang diambil dari rumus-rumus yang pasti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ekonometrika yaitu metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat menyatakan dengan jelas atau menggunakan rumus pasti. Fungsi kredit investasi bank pemerintah nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KI = F (PDB, r, Inf, DM)$$

Keterangan :

KI = Kredit investasi (miliar Rp)

PDB = Produk Domestic Bruto (miliar Rp)

r = Tingkat suku bunga kredit investasi bank pemerintah (%)

Inf = Laju inflasi (%)

DM = Variabel Dummy untuk paket kebijakan 29 Januari 1990

tentang penyempurnaan sistem perkreditan di Indonesia

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

Untuk mengetahui koefisien regresi secara individu dilakukan melalui uji-t dan untuk menguji koefisien regresi secara serentak atau secara bersama-sama dilakukan uji-f.

1.6.3.1. Uji-t Statistik

Uji-t adalah untuk menguji hubungan regresi secara terpisah terhadap variabel terikat, untuk melihat pengaruh masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan uji-t ini adalah :

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk uji ini adalah sebagai berikut⁴ :

$$t_{Hitung} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta}{SE(\hat{\beta}_1)}$$

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya ini berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ artinya ini berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hepotesa nol (H_0) adalah hipotesa yang menyatakan tidak adanya peranan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. sedangkan hipotesa alternatif (H_a)

⁴ Damodar Gujarati, Ekonometrika Dasar

merupakan hipotesa yang menyatakan adanya peranan dari variabel bebas. Penyajian ini dilakukan dengan membandingkan nilai-t yang diperoleh dari perhitungan dengan nilai-t yang ada pada tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak.

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak sedangkan H_a diterima.

1.6.3.2. Uji-F Statistik

Uji ini merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-f ini juga dimaksud untuk melihat pengaruh seluruh koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat, adapun perhitungan uji-f adalah sebagai berikut :

$$F\text{Hitung} = \frac{\frac{R^2}{(K-1)}}{\frac{(1-R^2)}{(n-K)}}$$

Jika f-hitung telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai f-tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

H_0 adalah hipotesa yang mengatakan tidak adanya peranan variabel bebas terhadap variabel terikat

1.6.3.3. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda dengan simbol R^2 dapat digunakan untuk mengukur besarnya prosentase hubungan variabel bebas terhadap naik atau turunnya variabel terikat, nilai koefisien tersebut antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

1.6.4 Pengujian Asumsi Klasik

1.6.4.1 Autokorelasi

Salah satu asumsi dalam model regresi linier tidak terjadinya autokorelasi pada kesalahan pengganggu (*error term*). Jadi (X_i, X_j) bila asumsi ini tidak dipenuhi, maka estimasi yang diperoleh tidak lagi efisien, karena selang keyakinannya makin melebar, sehingga uji-t dan uji-f menjadi tidak valid, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji Darbin Watson (uji DW) dengan rumus DW sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n e_t - e_{t-1}}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Hipotesa yang digunakan adalah :

$$H_0 : B_0 = 0$$

$$H_0 : B_0 \neq 0$$

Nilai kritis didalam D_n dapat diperoleh dari tabel DW yang tergantung pada banyaknya observasi n dan besarnya variabel penjelas.

Jika hipotesis H_0 tidak ada korelasinya maka :

$d_{hitung} < d_l$ H_0 ditolak

$d_{hitung} > d_l$ H_0 diterima

$d_l \neq d_{hitung} \neq d_u$ pengujian tidak meyakinkan

Jika hipotesis H_0 tidak ada korelasi negatif maka

$d_{hitung} > 4 d_l$ maka H_0 ditolak

$d_{hitung} < 4 d_u$ maka H_0 diterima

$4 d_u \leq d_{hitung} \leq 4 d_l$, pengujian tidak meyakinkan

Jika H_0 dua ujung yaitu tidak ada serial autokorelasi baik positif atau negatif maka :

$d_{hitung} < d_l$ maka H_0 ditolak

$d_{hitung} < 4 d_l$ maka H_0 ditolak

$d_u < d\text{-table} < 4 d_u$ maka H_0 diterima

$d_l \leq d\text{-hitung} < 4 d_u$ maka pengujian tidak meyakinkan

$4 d_l \leq d\text{-hitung} \leq d_l$ maka pengujian tidak meyakinkan

konsekuensi yang akan terjadi apabila adanya autokorelasi didalam suatu model :

1. bahkan jika kita mengabaikan korelasi serial dalam penaksiran serial dalam OLS yang dihitung secara konvensional dan variannya, penaksiran tadi masih tetap tidak efisien (kalau dibanding dengan BLUE). Oleh karena itu selang keyakinan menjadi lebih lebar secara tidak perlu dan pengujian artinya (signifikan) kurang kuat.
2. Meskipun penaksiran OLS tidak bias, yang merupakan sifat pengumpulan ulang, dalam suatu sample tertentu, penaksiran tadi nampaknya memberikan gambaran yang menjumpai dari nilai populasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, penaksiran OLS menjadi sensitive terhadap fluktuasi penyampelan.

1.6.4.2 Multikolinier

Multikolinier mempunyai arti bahwa terdapat suatu hubungan linier yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel bebas atau variabel independen dari suatu model regresi. Adanya multikolinier ini biasanya ditandai dengan adanya koefisien determinasi R^2 yang tinggi, serta berdasarkan uji koefisien regresi secara keseluruhan berdasarkan uji-f, menolak hipotesa nol bahwa $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_3 = 0$. Keadaan ini merupakan tanda bahwa kemungkinan besar adanya kasus multi

kolinieritas, dimana nilai-nilai t bersifat tidak nyata. tetapi uji- f serta koefisien R^2 sangat tinggi.

1.6.4.3 Heteroscedastisitas

Suatu asumsi yang penting dari model regresi linier adalah bahwa gangguan (disturbance) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah Heteroscedastisitas yaitu semua gangguan mempunyai varian yang sama.

BAB II

Landasan Teori

2.1. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang masalah investasi dan kredit investasi, penelitian tersebut dilakukan oleh Agus Subagya (1997), yang mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Investasi Bank Pemerintah Pada Sektor Industri Paska Paket Januari 1990”, penelitian tersebut melihat tentang penyaluran dana perbankan untuk kredit investasi dari bank-bank pemerintah Indonesia, khususnya pada sektor industri. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel tahun 1975 sampai dengan tahun 1995 tersebut menggunakan kredit investasi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah tingkat bunga, inflasi, pendapatan nasional, dan pakjan 1990. Penelitian tahun tersebut memberikan kesimpulan yang isinya antara lain⁵ :

- a) Tingkat suku bunga berhubungan positif dan signifikan secara statistik terhadap Kredit Investasi bank pemerintah pada sektor industri, ini menggambarkan Kredit Investasi tetap naik walaupun tingkat suku bunga naik.
- b) Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dan positif antara pendapatan nasional dengan Kredit Investasi bank pemerintah pada sektor industri, dengan demikian kenaikan pendapatan nasional mampu mempengaruhi Kredit Investasi bank pemerintah pada sektor industri di Indonesia.
- c) Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dan positif antara paket kebijakan Januari 1990 dengan Kredit Investasi bank pemerintah pada sektor

⁵ Agus Subagya, Faktor-Faktor yang mempengaruhi kredit investasi bank-bank pemerintah Indonesia pada sektor industri paska paket Januari 1990, 1997

industri, hal ini menggambarkan bahwa setelah paket kebijakan Januari 1990, kebijakan ini mampu mempengaruhi dan meningkatkan Kredit Investasi bank pemerintah pada sektor industri.

- d) Perkembangan Kredit Investasi bank pemerintah pada sektor industri secara keseluruhan pada periode 1975–1995 menunjukkan kemajuan-kemajuan dibidang produksi baik dalam meningkatkan volume, mutu, maupun jenis-jenis industri, dengan adanya dukungan dana kredit investasi bank pemerintah pada sektor industri ini, berarti hal ini mampu untuk membantu kesempatan kerja baru, kebijakan kredit investasi tetap diarahkan untuk membiayai kegiatan produktif yang banyak menyerap tenaga kerja serta kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah. Kebijakan pakjan 1990 tentang penyempurnaan sistem per Kreditan ini mampu menggugah para investor untuk lebih berani dalam penanaman investasinya melalui kredit.

Perbedaan antara penelitian yang disebutkan tadi dengan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah terletak disektor penyaluran kredit investasinya, kalau penelitian yang dilakukan diatas penekanannya pada sektor industri, akan tetapi kalau penelitian yang diajukan oleh poenulis penekannannya ke sektor pertanian.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yulianto tentang "Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di DIY" dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai berikut⁶.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di DIY membutuhkan dana, sumber dana tersebut berasal dari pemerintah dan non pemerintah di DIY. Kontribusi dan jumlah investasi dari sektor swasta lebih besar dari pada kontribusi dan jumlah investasi dari sektor pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan

⁶ Yulianto, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1997

pembangunan telah mampu meningkatkan partisipasi swasta khususnya dalam investasi pembangunan. Untuk melihat perkembangan peran investasi swasta di DIY maka perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi investasi tersebut. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di DIY adalah :

- a. Tingkat suku bunga
- b. Produk domestik regional bruto
- c. Jumlah angkatan kerja
- d. Potensi suatu wilayah
- e. Tersedianya sarana dan prasarana di suatu daerah (seperti sarana transportasi, telekomunikasi, pusat pembangkit listrik)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tingkat bunga, produk domestik regional bruto, potensi suatu wilayah, tersedianya sarana dan prasarana suatu daerah seperti sarana transportasi, telekomunikasi, pusat pembangkit listrik dll, dan paket kebijakan Januari 1983 mempunyai pengaruh terhadap investasi melalui PMDN dan PMA di DIY selama kurun waktu 1970-1995.

Tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penulisan skripsi berdasarkan pokok permasalahan di atas adalah bahwa sampai seberapa jauh pengaruh dari pendapatan domestik regional bruto, jumlah angkatan kerja, tingkat bunga, Paket kebijakan Juni 1983 terhadap investasi melalui PMDN dan PMA di DIY secara parsial maupun secara simultan.

Kesimpulan yang didapat setelah melakukan perhitungan regresi analisis adalah .

- a. Dari pengujian secara parsial bahwa variabel pendapatan domestik regional bruto dan Paket kebijakan Juni 1983 berpengaruh positif terhadap investasi

PMDN dan PMA, sedangkan angkatan kerja dan tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap PMDN dan PMA.

- b. Pengujian secara serempak menunjukkan semua variabel penjelas yaitu, PDRB, jumlah angkatan kerja, tingkat bunga, paket kebijakan Juni 1983, secara serempak berpengaruh secara nyata terhadap investasi PMDN dan PMA.
- c. Dari hasil-hasil pembahasan secara kualitatif bahwa nilai PMDN yang disetujui mulai berkembang dengan pesat, setelah tahun 1983 telah terjadi deregulasi yang isinya antara lain pelepasan pagu kredit dan penurunan suku bunga kredit oleh masing-masing bank, sehingga dana investasi yang tersedia lebih banyak. Untuk penanaman modal asing mulai berkembang pada tahun 1990 karena investasi asing menginvestasikan pada tahun 1990 setelah melihat investasi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai berkembang pada tahun 1988.
- d. Nilai realisasi masing-masing PMDN dan PMA begitu rendah dari nilai persetujuannya. Hal ini disebabkan masalah-masalah permodalan yang dihadapi investasi bagi pembiayaan investasinya dan adanya pemindahan realisasi investasinya ke propinsi lain. karena propinsi lain tersebut dipandang oleh investor lebih diprioritaskan dan menguntungkan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2. Pengertian Bank dan lembaga keuangan

Perbankan adalah inti dari sistem keuangan tiap negara, dalam hal ini bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan usaha pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dananya. Bank itu sendiri melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.

Bank juga memberikan kredit kepada sektor perekonomian serta melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasanya dari produsen kekonsumen, bank juga merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

Peran bank seperti yang telah diuraikan diatas dapat dibutuhkan oleh bank-bank di Indonesia dalam keikut sertaanya membangun perekonomian nasional selama ini.

Difinisi bank menurut UU No 14/1996 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah: "suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Sedangkan lembaga keuangan menurut UU tersebut adalah : "suatu badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan antara lain menarik uang dari dan menyalurkannya pada masyarakat".

Dilihat dari definisi tentang bank tersebut bank dapat dikelompokkan kedalam tiga macam yaitu :

⁷ Thomas Suyatno DKK, Kefembagaan Perbankan, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996 Hal 12

1. Bank sebagai penerima kredit

Disini bank tersebut menerima uang serta dana-dana lain dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta setiap saat, deposito berjangka yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan habis, dan simpanan dalam bentuk rekening Koran atau giro, yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis pada bank.

2. Bank sebagai pemberi kredit

Bank melakukan operasi perkreditan secara aktif, tanpa harus mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

3. Bank sebagai pemberi kredit

Bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat melalui penciptaan uang bank⁶.

2.3. Fungsi Bank

Menurut UU RI No 7 1992 tentang perbankan memberikan arti bank sebagai berikut : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan definisi bank tersebut, jelas bank sangat erat hubungannya dengan uang yang digunakan untuk melancarkan seluruh aktifitas keuangan masyarakat. Bank sangat diperlukan dalam memobilisasikan dana yang ada pada masyarakat. dengan demikian bank mempunyai fungsi sebagai berikut :

⁶ M Sinungun, Manajemen Dan Bank. Bina Aksara Jakarta 1990, Hal 3

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat.
- b. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.
- c. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau lembaga pemberian kredit⁷.

2.4. Penawaran kredit perbankan

Melalui pendekatan angka pengganda kredit kita pun akan memperoleh gambaran bagaimana sistem perbankan dapat menciptakan kredit, bila mereka memperoleh tambahan deposito otonom. Demikian juga hal serupa bila otoritas moneter mengendalikan uang primer, maka perubahan itu akan menyebabkan pula perubahan jumlah kredit yang ditawarkan atau diciptakan oleh sistem perbankan, tentu juga peranan ekonomi dari kredit yang diberikan oleh sistem perbankan tergantung dari tipe-tipe bank yang sedang diamati, misalnya untuk bank-bank umum atau bank-bank komersial, deposito otonomi merupakan merupakan bagian dari portafel dari para nasabah, sehingga adanya perubahan deposito ini tidak saja akan mempengaruhi kredit bank tetapi juga berpengaruh terhadap uang yang beredar dalam masyarakat (Niehans, 1978, More, 1988).

Pada prinsipnya bank-bank umum akan berusaha untuk mendapatkan keuangan "maksimum". Dan kondisi ini mungkin akan tercapai bila biaya margin dari pemberian kredit sama dengan manfaat marginal (benefit marginal) yang diperoleh bank yang bersangkutan. Ini berarti bahwa bank sebagai pihak pemasok kredit (*supply of credit*) harus mengkonfersikan aktiva-aktivasnya menjadi instrumen-instrumen kredit dalam rangka meminimalkan biaya atau memaksimalkan pendapatan. Langkah yang dapat ditempuh untuk maksud tersebut adalah antara lain dengan

⁷ Jangker Sihombing, Pengantar Fund Manajemen untuk Perbankan Indonesia, 1990 Hal 31

mengatur atau mengelola komponen angka pengganda uang atau kredit dan aktifa untuk bervariasi. Komponen-komponen angka pengganda tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan otoritas moneter, tingkat suku bunga, perolehan atau manfaat yang diperoleh dari berbagai macam tabungan atau investasi. Perilaku penabung dan tingkat penjatahan kredit (*degree of credit rationing*). Adanya perubahan variabel-variabel kunci dari komponen angka pengganda itu akan berpengaruh terhadap angka pengganda uang dan tentu saja terhadap penawaran kredit dan uang beredar (Niehans, 1979, Mayer, 1984).

Selanjutnya bila analisis mengenai penawaran kredit bank ini kembali berkiblat ke Melitz dan Pardue (1973), maka model penawaran kredit oleh sistem perbankan dapat dirumuskan sebagai berikut⁸ :

$SK = G(S, I_c, I_b, BD)$ dimana $g_1, g_2, g_4 > 0$ dan $g_3 < 0$

SK = Jumlah nilai kredit yang ditawarkan oleh bank

S = Kendala-kendala yang dihadapi oleh bank, seperti tingkat cadangan bank atau ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib.

I_c = Tingkat bunga kredit bank

I_b = Biaya oportunitas peminjaman uang

BD = Biaya deposito bank

2.5. pengertian dan tujuan kredit

Salah satu kegiatan pokok dari bank dalam kegiatan pengalokasian dana adalah menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. menurut UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

⁸ Insukindro, Ekonomi Uang Dan Bank, BPFE, Yogyakarta Hal 48

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kegiatan penyaluran kredit bank tersebut pada prinsipnya dapat dibagi menjadi tiga sasaran pokok yaitu sebagai berikut :

1. untuk memenuhi kebutuhan kredit oleh masyarakat yang merupakan tugas bank-bank umum.
2. Untuk menciptakan dan atau memperkuat hubungan nasabah dengan membiayai usaha-usaha yang memenuhi syarat kredit.
3. Kegiatan perkreditan merupakan sumber utama dari hasil usaha bank pentingnya penyaluran kredit bagi perbankan dapat dilihat dari komposisi penyaluran dananya yang sampai saat ini masih didominasi pos kredit.

Sedangkan tujuan kredit adalah keuntungan atau profitability yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita, untuk tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila, dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai Agent Of Development adalah⁹ :

1. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan perbankan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat, dan kepentingan pemilik modal (pengusaha).

⁹ Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, STIE Perbannas dan Gramedia, Jakarta, 1992 Hal 14

2.6. Fungsi Kredit

Usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya kepada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel, maka akan meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang.

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran uang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan melalui barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit, hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan maupun para pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Denngan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas dan dapat mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek-proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha dan pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelola diperlukan pula tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan yang berupa kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang memiliki cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan akan tetapi meningkatkan hubungan internasional.

2.7. Azas Perkreditan.

Dalam memberikan kredit harus mempertimbangkan resiko atau *degree of risk*. Resiko yang ada sedapat mungkin diperkecil, sehingga bank tidak akan menghadapi berbagai kesulitan. Kredit yang diberikan kepada debitur pasti ada resiko dan sulit untuk dihilangkan, hanya diberikan oleh pihak perbankan diusahakan merata, artinya kredit tersebut jangan hanya diberikan kepada satu orang atau golongan debitur saja, sebab jika debitur tersebut jatuh bangkrut maka bank itu pun akan jatuh bangkrut juga. Sehingga perlu adanya azas dalam perkreditan. Azas perkreditan tersebut meliputi :

a. Azas kuantitas.

Jumlah kredit yang diberikan jangan terlalu besar, sebaiknya kecil saja dan diberikannya kepada banyak nasabah.

b. Azas kualitas

Kredit jangan hanya diberikan hanya sejenis usaha saja, akan tetapi sebaiknya harus ada satu pemerataan terhadap banyak jenis usaha.

c. Azas selektifitas

Hanya nasabah yang punya potensi saja yang seharusnya diberikan pinjaman kredit.

2.8. Kredit menurut sektor ekonomi.

Kredit menurut sektor ekonomi didasarkan atas klasifikasi ekonomi menurut *internasional standard clasification of all economic activities (ISIC)* yang diatur oleh perbankan. Rincian sektor ekonomi tersebut didasarkan atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititik beratkan pada sektor ekonomi. Yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu secara ekonomi tersebut dirinci atas :

a. Sektor Pertanian.

Yang usaha-usahanya untuk memproduksi hasil tanaman, perikanan, peternakan, serta kehutanan dan pemotongan kayu.

b. Sektor Pertambangan

Meliputi usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas.

c. Sektor Perindustrian.

Meliputi kegiatan perubahan bentuk (transformasi) pengolahan baik secara mekanis maupun kimiawi dari suatu bahan baku menjadi barang jadi yang dikerjakan mesin, manusia dan lain-lain.

d. Sektor Perdagangan.

Meliputi kegiatan ekspor, impor, distribusi, hotel dan restoran.

e. Sektor Jasa-jasa.

Meliputi real estate, profesi selain dokter (notaris, akuntan, dan lain-lain) leasing (usaha sewa beli barang modal) dan lain-lain (jasa dari LKBB, asuransi, agen).

f. Sektor Lain-lain.

Sektor ekonomi yang tidak termasuk dalam salah satu sektor ekonomi tersebut di atas.

2.9. Pengertian Kredit Investasi.

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru.

Rehabilitasi adalah peningkatan alat-alat produksi yang tingkat kapasitas, kualitas maupun kuantitas lebih baik dari alat-alat produksi yang lama.

Modernisasi adalah penggantian alat-alat produksi yang tingkat kapasitas, kuantitas, maupun kuantitasnya lebih baik dari alat-alat produksi yang lama.

Perluasan adalah penambahan kapasitas baru yang dibangun secara lengkap dan merupakan tambahan dari kapasitas produksi yang ada.

Proyek baru adalah pembangunan pabrik industri baru dengan alat-alat produksi dan untuk usaha baru.

2.9.1. Ciri-Ciri Kredit Investasi.

1. Diperlukan untuk penanaman modal.
2. Penggunaan kredit tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya.
3. Kredit tersebut berjangka menengah dan jangka panjang.

2.9.2. Langkah-langkah Pemberian Kredit Investasi

Untuk dapat melakukan kegiatan perkreditan yang sehat dikenal adanya prinsip 5C yaitu :

a. Character

Adanya keyakinan dari keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga memiliki rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai manusia, anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya.

b. Capacity

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan akan dibiayai dengan kredit bank.

c. Capital

Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur atau peminjam

d. Collateral

Beragam jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.

e. Condition Of Economic

Situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, kebudayaan dan lain-lain, yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Setelah dilakukan penilaian, pendahuluan atas permohonan kredit yang dikenal dengan prinsip 5C tersebut di atas maka perlu diperhatikan hal-hal dalam pemberian kredit investasi adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan Data

Agar data yang diberikan oleh pemohon kredit lengkap maka pihak bank perlu memberikan pedoman kepada nasabah atau pemohon dalam pengajuan kredit tersebut, cara yang paling sederhana adalah memberikan quisioner untuk diisi oleh pemohon dengan disertai dengan penjelasan-penjelasan secukupnya.

2. Perencanaan yang lengkap, mendetail dan fleksibel

Pemohon kredit seyogyanya menyusun perencanaan yang lengkap, mendetail dan fleksibel serta rencana produksi, rencana ekspansi dan rencana modernisasi. Bank harus benar-benar meneliti kemungkinan dapat terealisasi rencana tersebut atau tidak. Hal ini perlu diteliti apabila terdapat keseimbangan dalam perbandingan alat-alat yang digunakan dalam produksi, baik yang menyangkut luas usahanya maupun yang

menyangkut sesama alat-alat produksi yang akan digunakan. Rencana yang akan diajukan pemohon harus terdapat unsur-unsur fleksibel, karena keadaan dimasa yang akan datang tidak dapat kita perhitungkan dengan seksama pada masa sekarang.

2.9.3. Prosedur Permohonan Kredit Investasi

Setiap pemohon kredit oleh perusahaan hendaknya diajukan langsung kepada bank yang menjadi relasinya sesuai sektor yang dilayaninya. Apabila perusahaan tersebut berdomisili di daerah maka, permohonan kredit ini diajukan kepada kantor cabang bank yang bersangkutan di daerah setempat. Untuk mempermudah bank melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut permohonan kredit investasi harus disertai dengan proposal proyek yang dilengkapi dan terinti mengenai usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang diajukan.

2.10. Faktor-faktor yang menentukan investasi

Yang menentukan besar kecilnya penyaluran investasi ada dua yaitu :

1). Macam atau tujuan pengeluaran

Produsen membeli barang-barang produksi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dalam memutuskan apakah membeli atau tidak barang-barang tersebut adalah harapan keuntungan yang diperoleh. Harapan keuntungan inilah yang merupaka faktor utama dalam mengambil keputusan tersebut.

2). Kemungkinan yang terbuka untuk membiayai investasi

Perusahaan tidak perlu mendasarkan rencana investasi atas dasar penghasilan sekarang yang ada dalam kas perusahaan. Perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh dari lembaga keuangan (perbankan). Mengenai mudah tidaknya memperoleh kredit, tergantung juga pada benefiditas perusahaan serta kemungkinan juga koneksi dari perusahaan.

2.10.1. Pendekatan nilai sekarang (*present value*)

Pendekatan present value menyatakan bahwa proyek investasi dianggap menguntungkan dan dapat diterima apabila nilai sekarang tersebut lebih besar dari besarnya modal yang diterima, atau proyek investasi dianggap menguntungkan atau dapat diterima apabila proyek investasi tersebut mempunyai nilai sekarang netto (NPV) lebih besar dari 0, secara matematis menyatakan tersebut dirumuskan sebagai berikut¹⁰.

$$GPV > C = \frac{R1}{(1+r)^1} + \frac{R2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Rn}{(1+r)^n}$$

$$\text{Atau } NPV = -C + \frac{R1}{(1+r)^1} + \frac{R2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Rn}{(1+r)^n} > 0$$

Dimana :

C = besarnya modal yang diperlukan

GPV = nilai pendapatan sekarang proyek investasi

NPV = nilai bersih sekarang proyek investasi

n = perkiraan umur ekonomis proyek investasi

r = tingkat bunga

1,2,...n = periode 1,2,...n

R = penerimaan bersih yang diperkirakan diperoleh dari proyek investasi

Angka ini merupakan jumlah hasil penerimaan penjualan proyek yang dihasilkan oleh proyek investasi yang bersangkutan oleh masing-masing periode sesudah dikurangi seluruh biaya, kecuali biaya penyusutan dan biaya modal.

Dari rumus di atas R1,R2,Rn yang seluruhnya sama dalam arti tidak berubah akan dihasilkan NPV dan GPV lebih tinggi. Nilai positif NPV yang lebih besar diartikan tingkat keuntunganyang diperoleh dari proyek investasi tersebut tinggi.

¹⁰ Soediyono R, Ekonomi Makro Analisis IS-LM, Liberti Yogyakarta, Hal 172

Sebaliknya apabila nilai R naik maka nilai NPV dan GPV akan turun, menurunnya NPV dan GPV dapat menghasilkan GPV lebih besar dari C ($GPV < C$) yang berarti proyek investasi akan mendatangkan kerugian.

2.10.2 Pendekatan Marginal Efficiency Of Capital (MEC)

Dengan pendekatan ini langkah pertama yang kita ambil ialah menemukan tinggi MEC proyek investasi. Apabila tingginya MEC telah ditemukan, langkah selanjutnya ialah membandingkan nilai MEC dengan tingkat bunga di pasar, apabila :

$MEC > r =$ proyek investasi kita terima

$MEC < r =$ proyek investasi kita tolak

MEC didefinisikan sebagai tingkat diskonto (bunga) yang menyamakan nilai sekarang sebelum proyek investasi dengan besarnya modal yang diperlukan untuk ditanam dalam investasi tersebut, atau merupakan tingkat diskonto yang tinggi menghasilkan nilai NPV proyek investasi besar nol. Berdasarkan definisi tersebut maka MEC proyek investasi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus¹¹ :

$$C = \frac{R1}{(1+MEC)^1} + \frac{R2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{Rn}{(1+MEC)^n} \text{ atau}$$

$$NPV = -C + \frac{R1}{(1+MEC)^1} + \frac{R2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{Rn}{(1+MEC)^n} = 0$$

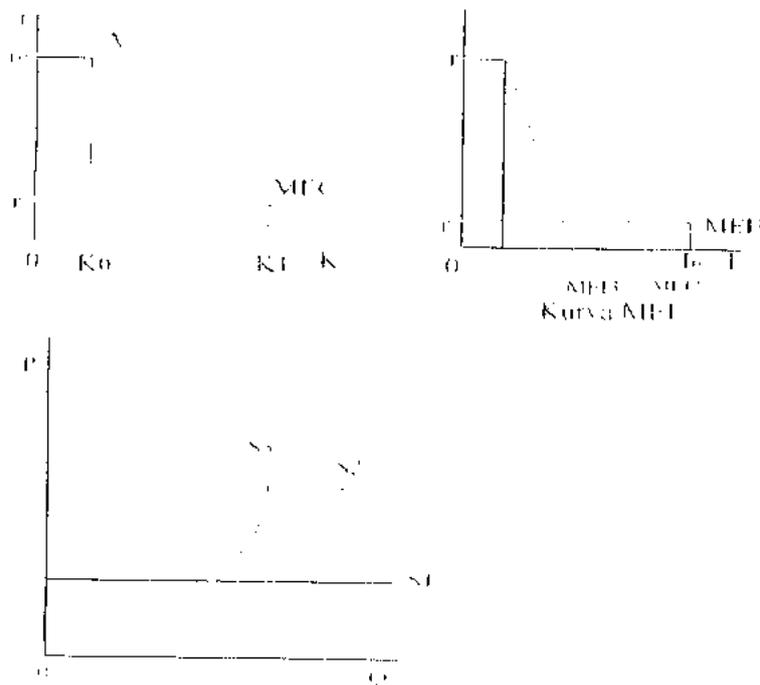
Apabila nilai R1 dan R2 serta Rn nilainya tidak sama maka nilai MEC dapat kita temukan dengan cara-cara. Jika nilai NPV lebih besar dari nol ($NPV > 0$)

2.10.3. Hubungan Kurva MEC dengan Kurva MEI

Kurva MEC agresif menunjukkan jumlah stok kapital nasional yang diinginkan oleh masyarakat pada berbagai tingkat bunga. Sedangkan kurva permintaan agresif (Marginal Efficiency Of Investment / MEI) menunjukkan pengertian aliran modal pada berbagai tingkat bunga.

¹¹ Ibid No.10 Hal 175

Investasi total yang terjadi dalam suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat-alat yang tidak ekonomis lagi (replacement) dan sebagian lagi berupa pembelian alat-alat produksi baru untuk memperbesar kapasitas produksi¹².



Gambar 2.1

Hubungan antara kurva MEC dengan kurva MEI pada berbagai kemungkinan. Bentuk kurva penawaran alat kapital.

Dengan melihat kurva di atas dapat disimpulkan hubungan antara kurva MEC dengan kurva MEI. Mula-mula perekonomian berada dalam keseimbangan dengan suku bunga r_0 dan k_0 pada titik A maka kurva MEC. apabila penyusutan yang terjadi sebesar r^* (MEI) berarti besarnya investasi untuk replacement adalah sebesar k_0 . faktor utama yang turut menentukan bentuk kurva MEI adalah fungsi penawaran alat-alat produksi.

¹² Ibid no 10 Hal 179

2.11. Variabel yang mempengaruhi Kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian

2.11.1. Tingkat Bunga

Tingkat bunga adalah suatu faktor yang menentukan besar kecilnya investasi yang diperlukan oleh masyarakat. Adapun hubungan tingkat bunga dengan investasi adalah negatif. Bahwa dengan menurunnya bunga dalam hal ini suku bunga pinjaman, akan menaikkan kredit investasi.

Seseorang mau membayar bunga untuk dana yang dipakai dikarenakan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang nantinya bisa diharapkan dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Kelebihan penerimaan atas pengeluaran (keuntungan) inilah yang merupakan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber kemampuan bagi investor untuk membayar bunga. Dengan kata lain, bunga dibayar karena dana tersebut produktif¹³

Tingkat bunga yang dipergunakan disini adalah tingkat bunga pinjaman pada kredit investasi yang berlaku khususnya pada bank-bank pemerintah. Karena bervariasinya suku bunga kredit, suku bunga kredit berkaitan langsung dengan suku bunga deposito mengingat sumber dana bank untuk memberikan kredit berasal dari depositan, sehingga tinggi rendahnya tingkat suku bunga kredit mencerminkan pula tinggi rendahnya suku bunga deposito. Semakin mahal yang dibayarkan bank kepada para deposan akan membawa dampak pada bunga kredit yang dibebankan kepada para investor.

¹³ Boediono. *Ekonomi Moneter* Edisi 3 BPFE Yogyakarta 1992 Hal 82

2.11.2. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu perekonomian (Negara) dalam waktu satu tahun. Dalam hal ini ada dua pengertian yang perlu dibedakan yaitu tentang GDP dan GNP. Pada GNP digunakan istilah “ Nasional ” karena batasnya adalah nasional kewarga negaraan, hal ini menunjukkan bahwa barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada dalam negeri maupun di luar negeri harus dimasukkan dalam GNP. Sedangkan istilah “Domestik” pada GDP digunakan karena batasan adalah wilayah suatu negara termasuk didalamnya orang-orang dan perusahaan asing.

Menurut Keynes, besarnya tabungan yang disalurkan oleh rumah tangga tergantung pada besar kecilnya pendapatan rumah tangga, makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, makin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersaebut¹⁴. Jadi diharapkan PDB berpengaruh positif terhadap jumlah dana bank yang terkumpul.

2.11.3. Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai hampir setiap negara di dunia adalah inflasi, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk secara umum dan terus menerus.

Secara langsung dan tidak langsung inflasi bisa mengakibatkan penurunan invlasi yang ada. Pertama secara langsung kenaikan index biaya hidup karena sebagian barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor. Kedua, secara tidak langsung akan menaikkan index harga melalui kenaikan biaya produksi kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin yang harus diimpor (cost inflation). Ketiga, secara tidak langsung menimbulkan

¹⁴ Sadono Sukirno Teori Makro Ekonomi, PT raya Grafindo Persada, Edisi 2 1995

kenaikan harga dalam negeri, karena kemungkinan kenaikan harga-harga barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran, pemerintah yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (demand inflation).

Adanya kenaikan ini menyebabkan laju inflasi semakin tinggi yang menyebabkan laju inflasi berpengaruh negatif terhadap kredit investasi yang diberikan, atau dengan kata lain dengan naiknya inflasi maka akan menaikkan tingkat suku bunga, sehingga dengan naiknya tingkat suku bunga maka kredit yang di berikan oleh bank akan turun¹⁵.

2.11.4. Pendekatan Kebijakan Januari 1990

Peran serta pemerintah dalam mendorong investasi sangat diperlukan. Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah diharapkan motor penggerak bagi perkembangan menanam modal disegala bidang, sehingga dapat mengurangi keterbatasan dana untuk investasi dan lebih menghidupkan perekonomian. Salah satu kebijaksanaan pemerintah yang cukup berperan dalam hal ini kebijaksanaan deregulasi.

Perjalanan deregulasi ekonomi yang mulai sejak 1 Juni 1983 telah bisa kita lihat hasilnya pada awal tahun 1980-an cukup memberi peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula pengaruh terhadap perkembangan investasi.

Dari sini dapat dikatakan bahwa paket kebijakan Januari 1990 (Pakjan 1990) merupakan titik balik dari deregulasi dibidang perbankan yang telah dimulai dari Juni 1983. pengaruh yang mungkin besar pada dunia perbankan dari berbagai deregulasi perbankan sejak Juni 1983 hingga lahir paket kebijakan Januari 1990 adalah paket kebijakan Oktober 1988. hasil yang langsung kelihatan dari

¹⁵ Ibid No 10 Hal 82

kebijaksanaan ini adalah melonjaknya jumlah harga-harga baru dan bertambahnya kantor-kantor cabang.

Sebagai konsekuensi dari banyaknya bank yang ada, persaingan antar bank dalam menggaet dana dari masyarakat juga semakin tetap, cara yang paling sederhana untuk menarik sebesar-besarnya dana masyarakat tersebut adalah dengan memberikan tawaran bunga yang tinggi bagi dana masyarakat yang disimpan di bank. Akibat lanjut dari proses ini adalah tingkat bunga kredit yang disalurkan pada masyarakat menjadi semakin tinggi. Karena itu bank memerlukan margin (sebesar selisih bunga kredit dengan tingkat bunga simpanan) untuk menutupi biaya operasi dan untuk keuntungan perusahaannya.

Tingkat bunga yang tinggi menurut John Maynerd Keynes tidak akan mendorong laju inflasi secara makro, menurutnya hanya dengan tingkat bunga yang rendah laju inflasi akan didorong. Karena besarnya saving masyarakat lebih ditentukan oleh tingkat pendapatannya, bukan oleh besarnya tingkat bunga.

Dipihak lain, MC Kimon dan Edward Shaw berpendapat sebaliknya, tingkat suku bunga yang rendah justru akan mengurangi inisiatif masyarakat untuk menabung, mendorong investasi yang tidak efisien dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat akumulasi modal¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kebijaksanaan paket kebijakan Januari 1990, harus diakui merupakan perubahan kebijakan moneter secara tegas dari alur pemikiran yang menckankan tingkat bunga rendah kepada penentuan tingkat bunga pasar untuk meningkatkan ekonomi nasional.

¹⁰ Majidi Nasyrth, *Kebijakan Paket Januari 1990 Penghapusan Dualisme Ekonomi*, Prisma Edisi II, LP3ES, Jakarta 1991 Hal 25

BAB III

Gambaran Umum

3.1. Sejarah Singkat Perbankan Indonesia

Sejarah perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1827 dengan didirikannya *De Javasche Bank*. Walaupun bank ini milik swasta, namun pemerintah Hindia Belanda memberikan kewenangan untuk mengdarkan uang keras dan uang logam di wilayah Indonesia yang dulunya masih disebut Hindia Belanda. Dengan demikian manajemen bank harus disetujui oleh pemerintah Belanda.

Sampai pada perang dunia kedua, bank-bank termasuk bank-bank Belanda Inggris, Jepang, Tionghoa, dan Indonesia asli. Hampir tiap bank tutup selama pendudukan Jepang kecuali Yokohama Specie Bank dan Algemene Valk Credit Bank, yang namanya diganti menjadi Shamin Ginko walaupun fungsi-fungsinya tetap sama uang kertas yang beredar pada waktu itu dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang.

Setelah Indonesia memproklamerkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Nasional Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. namun selama diadakan perundingan-perundingan kearah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dengan pihak Belanda pada tahun 1946, ditetapkan bahwa *De Javasche Bank* akan berfungsi sebagai bank sentral Indonesia.

Setelah jatuhnya pemerintahan orde lama dan setelah dimulainya pemerintahan Soeharto, berlaku peraturan-peraturan perbankan baru, yaitu UU No 14 :1967 tentang sistem perbankan di Indonesia.

Setelah dikeluarkan UU No 14 tentang investasi modal asing di Indonesia, beberapa bank asing bank cabang-cabang maupun perwakilannya, juga mulai dilancarkan operasi-operasinya di Indonesia. Setelah menteri mengeluarkan keputusan tahun 1978 tentang lembaga keuangan, beberapa lembaga keuangan nonbank mulai

melancarkan operasi-operasi, terutama yang berhubungan dengan investasi dan pemberian-pemberian pinjaman jangka panjang.

Suatu garis besar secara umum tentang kondisi-kondisi perbankan yang berlaku di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut : bank-bank negara memainkan peranan besar dalam kredit jangka pendek, maupun dalam membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah dan perusahaan swasta, bank-bank asing dan lembaga-lembaga keuangan akhir-akhir ini menjadi lebih aktif dalam kegiatan ekspor impor dan transaksi valuta asing. Bank-bank negara mempunyai cabang ditiap kota di Indonesia, bank swasta hanya beroperasi di kota-kota besar, sedangkan bank-bank asing hanya beroperasi di kota-kota di pulau Jawa.

Keberadaan bank-bank umum di Indonesia sejak tahun 1967 sampai 1992 diatur oleh UU No 14 / 1967 yang kemudian diganti oleh UU No 7 / 1992 tentang perbankan. Pergantian dasar hukum keberadaan sistem perbankan di Indonesia tersebut dikarenakan undang-undang yang lama tidak sesuai lagi dengan perkembangan moneter, khususnya sejak dicanangkan deregulasi yang dimulai 1 Juni 1983 dan kemudian diperkuat dengan kebijakan moneter 27 oktober 1983. pelaksanaan UU No 7 : 1992 mempunyai masa peralihan selama maksimal satu tahun atau dengan kata lain semua perbankan harus menyesuaikan diri dengan undang-undang ini selambat-lambatnya 25 Maret 1993. berkaitan dengan transformasi tersebut. berikut ini akan dibahas terlebih dahulu UU No 14 / 1967 dan kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan UU No 7 / 1992.

Berdasarkan UU No 14 / 1967 pada pasal 3 UU tersebut dibedakan adanya empat bank berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. Bank sentral adalah Bank Indonesia yang kemudian diatur dengan UU No 13 / 1968. bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya

terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank pembangunan adalah bank yang dalam mengumpulkan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan berharga jangka menengah dan jangka panjang serta dalam usaha terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan.

Selain itu bank juga dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya yang terdiri atas bank milik negara, bank milik swasta, bank milik koperasi, dan bank milik asing. Menurut pasal 20 UU No 14 / 1967 bank asing ini hanya dapat didirikan dalam bentuk :

- a. Cabang bank yang sudah ada di luar negeri, dan
- b. Suatu bank campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Disisi lain menurut UU No 7 : 1992 pasal 1 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Disebut pula dalam pasal itu tentang adanya bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), bank campuran serta kantor cabang bank. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia, dan satu atau

lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Kantor cabang adalah tiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatan.

Kantor bank menurut UU No 7 / 1992 ini relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan UU No 14 / 1967, demikian pula dengan masalah kepemilikan, pada UU No 14 / 1967 dikenal dengan adanya bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank koperasi dan bank-bank kecil lainnya. Sedangkan UU No 7 / 1992 hanya dikenal empat macam bentuk hukum suatu bank umum dan tiga macam bentuk hukum untuk badan perkreditan rakyat (BPR). Bentuk hukum bank umum dapat berupa salah satu dari perusahaan perseorangan, perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas (PT). Disisi lain bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari, perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas. Dalam UU No 7 1992 tersebut tidak lagi dikenal bank milik pemerintah atau bank milik swasta, walaupun pemerintah dapat menjadi pemilik saham mayoritas lembaga keuangan bank tersebut¹⁹.

3.2 Perkembangan Kredit Investasi

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha dari suatu kegiatan perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Sehingga dengan demikian dana-dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha dapatlah disebut juga sebagai faktor produksi, yang sejajar dengan faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan, mesin-mesin, bahan baku atau bahan penolong, kemampuan teknologi, manajemen dan lain-

¹⁹ Ibid No Hal 25

lain sebagai suatu sumber ekonomi, yang termasuk langkah. Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang sangat erat, baik bersifat positif maupun dalam sifat negatif.

Sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang lain yaitu dari sudut pandang perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan suatu kedudukan yang sangat istimewa, terutama di negara sedang berkembang sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada dimasyarakat. Akibat selanjutnya dapat dilihat bahwa pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang dominan dibanding dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lain. Dan sebaliknya akan berlainan apabila kita lihat pada neraca dan laporan perhitungan laba rugi pada bank-bank di negara maju komponen pendapatan sudah mempunyai kedudukan yang seimbang dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya.

Namun walaupun demikian diakui bahwa sektor perkreditan tetap merupakan kegiatan yang penting dari suatu industri perbankan baik di negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju, karena kredit merupakan salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dapat diibaratkan sebagai darah bagi mahluk hidup. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin luas maka kebutuhan kredit juga semakin meluas. Sampai dengan saat ini telah ada berbagai macam jenis kredit diantaranya : kredit untuk modal usaha, kredit investasi, kredit investasi kecil, dan kredit modal kerja permanen, kredit usaha kecil, dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini fokus permasalahan hanya pada kredit investasi²⁰.

²⁰ Teguh Pujo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bank-bank Komersial*, BPFE Yogyakarta Hal 1

Kredit investasi mulai diberikan permulaan pelaksanaan Pelita I. Kredit ini dimaksudkan untuk membiayai modal guna rehabilitasi, kemudian diperluas untuk perluasan dan pendirian proyek baru diberbagai bidang. Bagian terbesar dari kredit ini dengan kredit likuiditas Bank Indonesia (terutama sebelum paket kebijakan Januari 1990).

Pada tanggal 29 Januari 1990 di tetapkan kebijakan penyempurnaan sistem perbankan. Melalui kebijakan ini, bank dan lembaga keuangan didorong untuk mandiri dan mampu melaksanakan pengerahan dana masyarakat serta penyaluran ke sektor yang produktif sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan pada KLBI. Sebabnya kredit untuk beberapa kegiatan atau sektor sebelumnya untuk mendukung upaya swasembada pangan. Pengembangan koperasi serta peningkatan investasi. Dalam bidang peningkatan investasi ini, yang masih memperoleh KLBI adalah sektor perkebunan yang selama ini dikenal sebagai PIR (Perusahaan Inti Rakyat), yang meliputi PIR Tran, PIR BUN, PSN (Perkebunan Swsta Nasional), PRPTE (Peremajaan, Rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor). Selain itu penyaluran kredit investasi diprioritaskan untuk mengembangkan wilayah Indonesia bagian timur melalui kelonggaran jangka waktu kredit dan kepada bank-bank pelaksana yang membiayai proyek-proyek di wilayah tersebut diberikan keringanan pangsa pembiayaan Bank Indonesia. Dalam perkembangan secara bertahap penyediaan KLBI diarahkan menjadi kredit biasa, mengingat bahwa KLBI bukan merupakan dana yang dipupuk dari masyarakat, tetapi melalui percepatan uang. Pembatasan kredit likuiditas adalah kebijaksanaan yang tepat karena dapat mengurangi jumlah uang yang beredar, sekaligus mengurangi kemungkinan inflasi.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dana pembiayaan investasi dan pembiayaan jangka panjang lainnya

disalurkan ke berbagai sektor yang menyediakan kreditnya diberikan melalui perbankan. Program kredit investasi telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. hal ini disebabkan karena kredit tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dengan cara-cara pemberian kredit yang semakin lancar dan persyaratan yang semakin ringan. Kebijakan kredit investasi diarahkan untuk meningkatkan kredit investasi diberbagai bidang terutama yang bersifat menunjang ekspor dan migas²¹.

Prioritas pembangunan dalam setiap PELITA pada dasarnya adalah sama yaitu meletakkan sektor pada pertanian dan industri tetapi mempunyai sasaran pokok yang berbeda. Namun begitu, hal ini tidak berarti bahwa sektor-sektor lain terutama sektor jasa, yang menunjang kelancaran mobilitas produk dari sektor pertanian dan industri kurang mendapat perhatian. Karena penyaluran kredit investasi diberikan secara proporsional kepada pembangunan seluruh sektor ekonomi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

3.3 Perkembangan Kredit Investasi Pada Sektor Pertanian

Kredit investasi pada sektor pertanian diberikan kepada usaha-usaha untuk memproduksi hasil pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutana dan pematangan kayu. Kredit perbankan yang mengalir pada sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dapat mendukung program pembangunan pada umumnya dan program pembangunan dibidang pertanian pada khususnya²². untuk mengetahui perkembangan kredit investasi yang disalurkan oleh bank pemerintah nasional Indonesia dapat kita lihat tabel di bawah ini :

²¹ Republik Indonesia *REPELITA III*, (1979 / 1980 – 1983 / 1984), Buku 1 Hal 175

²² Republik Indonesia *REPELITA IV*, (1983 / 1990 – 1993 / 1994), Buku 1 Hal 459

Tabel 3.1
Posisi kredit investasi bank pemerintah nasional tahun 1985 s/d 2001
(dalam miliar rupiah)

Periode	Per Tanian	Per Tambangan	Per Industrian	Per Dagangan	Jasa- Jasa	Lain- Lain	Jumlah
1985	928	224	2367	333	995	21	4868
1986	1268	366	2995	335	1074	62	6100
1987	1657	341	3471	308	1378	23	7178
1988	2184	362	4611	439	1830	35	9461
1989	3174	352	5148	567	2247	59	11547
1990	4089	368	7033	1017	2770	289	15566
1991	4845	394	7801	1301	2893	396	17630
1992	6330	368	9490	1484	3863	658	22193
1993	7460	180	9487	4002	4037	-	25166
1994	8401	97	10247	2000	4342	-	25087
1995	9055	113	11550	2150	6096	-	28964
1996	9713	210	11346	2579	8726	-	32604
1997	10802	281	13545	3075	11703	-	39406
1998	11731	265	20043	3940	19223	-	55202
1999	9145	118	7200	1824	5797	-	24084
2000	6704	1497	4995	1651	4168	-	19015
2001	6755	2367	6457	2400	3706	-	21685

Sumber : statistik ekonomi keuangan Indonesia, bank Indonesia

Secara total perkembangan kredit investasi bank pemerintah nasional terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 4.868 pada tahun 1985 menjadi Rp 21.685 miliar. Dan sektor jasa juga mengalami peningkatan dari Rp 995 pada tahun 1985 menjadi Rp 3.706 pada tahun 2001.

Pada tahun 1985 merupakan tahun-tahun pertama pelaksanaan PELITA IV dalam PELITA dari tahun 1983. ini merupakan sumbangan terbesar sektor pertanian ialah dicapainya swasembada pangan beras disamping sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Penrimaan ekspor dan peningkatan kesempatan kerja. Dalam keadaan demikian, perkembangan ekonomi Indonesia tumbuh dengan laju 6.9 % pertahun dan sektor pertanian laju pertumbuhannya sebesar 3.4 % pertahun serta sumbangan dari PDB sebesar 21.4 %. Program kredit investasi yang merupakan salah satu sumber dana investasi bagi para pengusaha nasional telah berhasil terutama dalam hal :

- a. mengisi kebutuhan pengusaha nasional akan dana dan pembiayaan investasi yang sangat diperlukan untuk mengembangkan investasi khususnya disektor pertanian.
- b. memberikan pengembangan pengalaman kepada bank-bank komersial untuk memberikan kredit investasi yang bersifat jangka menengah guna pembiayaan proyek-proyek investasi.

Dalam periode 1985 sampai dengan 1998 kredit investasi yang diberikan oleh bank pemerintah nasional meningkat dari Rp 928 pada tahun 1985 menjadi Rp 11.731 pada tahun 1998. dengan adanya dana tersebut terhadap sektor-sektor ekonomi khususnya pada sektor pertanian maka diharapkan sektor pertanian dapat menunjang stabilitas ekonomi. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan yang semakin meningkat akan mendorong meningkatkan permintaan dalam negeri terhadap hasil industri dan jasa. Selanjutnya dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan pertanian juga berperan dalam mengentaskan penduduk dari kemiskinan, menurangi kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar golongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar. disamping mendukung pertumbuhan industri. Untuk melihat beberapa kemajuan sektor pertanian dapat dilihat berikut ini :

Tabel 3.2

Perkembangan produksi beberapa hasil pertanian

Produk	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Padi	48.240	48.181	46641	49744	51101	44254	49237	50866	51199	49591
Jagung	7.995	6460	6869	8246	9307	8759	10164	5204	9677	9165
Kacang	739	639	652	760	738	688	692	660	737	724
Kedelai	1870	1709	1565	1680	1517	1357	1306	1383	1018	817
Karet	335.0	335.0	362.4	341.0	334.6	330.5	332.6	293.7	336.2	338.7
Minyak swt	2186.0	2288.3	1930.3	2476.4	2569.5	4081.1	4013	4454.5	4094.0	4092.7
Coklat	39.5	42.7	43.7	9.4	46.8	65.9	60.9	58.9	60.5	60.3
Kopi	23.9	20.9	19.7	20.8	26.5	30.6	28.5	27.5	29.5	27.3
Teh	113.0	100.0	98.0	111.1	132.0	121.0	132.7	126.4	127.8	131.3
Kulit kina	2.7	0.6	0.3	0.0	0.4	0.5	0.4	0.9	0.6	0.6
Gula	2344.6	2336.1	2420.7	2104.7	2160.1	2187.2	1928.7	1801.4	1896.3	1939.7
Pembakau	7.5	3.1	5.1	4.9	7.1	7.8	7.7	5.8	14.8	4.9

Sumber : Indikator ekonomi 2002

Adanya kredit investasi yang diberikan pada sektor pertanian yang terus berjalan berarti membawa kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang masih menganggur atau orang-orang yang baru memasuki angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 54.7 juta orang pada tahun 1985, penyebaran penduduk yang bekerja diberbagai bidang ekonomi adalah sebagai berikut : 68 % pada sektor pertanian, 25 % pada sektor industri.

Sesuai dengan arah dan kebijakan perkreditan tiap REPELITA yang sedang berjalan yaitu REPELITA V dan IV. Kebijakan kredit investasi tetap diarahkan untuk membiayai kegiatan produksi yang menyerap tenaga kerja serta kegiatannya dengan sasaran pertumbuhan. kebijakan kredit akan diarahkan untuk mendorong kegiatan yang berorientasi ekspor.

Pada periode 1986 sampai dengan tahun 1991 yaitu setelah penurunan harga minyak yang tajam pada tahun 1986. Terjadi arah kebijakan yang menggaris bawahi peningkatan efisiensi, persaingan dan orientasi ekspor. Berbagai kebijakan seperti perbaikan prosedur untuk ekspor dan impor, penurunan nontarif dan lain-lain dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi dan menggalakkan ekspor nonmigas.

Sehingga dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan sektor pertanian meningkat sebesar 3,4 % pertahun yang disebabkan oleh peningkatan investasi swasta domestik dan asing serta peningkatan ekspor nonmigas.

Periode 1992 sampai dengan tahun 2001 perkembangan kredit investasi bank pemerintah pada sektor pertanian meningkat . Hal ini disebabkan oleh karena adanya paket kebijakan deregulasi Mei tahun 1993 yang mencakup beberapa peraturan yang dirasakan menghambat pemberian kredit perbankan, seperti metode perhitungan kesehatan bank dan permodalan bank disederhanakan. Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut mendorong perbankan lebih leluasa menyalurkan kreditnya.

3.4. Perkembangan hasil ekspor hasil pertanian

Indonesia merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian. Dapat pula dilihat dari besarnya nilai ekspor yang berasal dari pertanian. Pada tahun 2001 sebesar 2.438,5 SUS dari nilai ekspor keseluruhan berasal dari hasil-hasil pertanian. Sebelum hasil ini masih merupakan Rp 2.438,5 \$US dari nilai ekspor total.

Tabel 3.3
Proporsi nilai ekspor Indonesia
Tahun 1990 – 2001 (100.000 us \$)

Tahun	Pertanian	Lain-lain Non migas	Migas	Jumlah
1990	2083.2	12520.9	11071.1	25675.2
1991	2281.2	15966.0	10894.8	29142.0
1992	2212.0	21084.2	10670.7	33996.9
1993	2644.2	24432.9	9745.9	36823.0
1994	2818.4	27541.3	9693.7	40053.4
1995	2888.5	32065.1	10464.6	45418.0
1996	2912.7	35180.2	11722.0	49814.9
1997	3132.6	39068.3	11622.5	53443.6
1998	3653.5	37321.8	7872.3	48847.6
1999	2901.5	35971.7	9792.2	48665.4
2000	2709.1	45048.3	14366.6	62124.0
2001	2438.5	41246.1	12636.3	56320.9

Sumber : Indikator ekonomi

Dari tabel di atas nampak bahwa peranan sektor pertanian mengalami kenaikan. Namun persentase kenaikannya tidak sebesar yang terjadi pada sektor industri dan pertambangan. Hal ini wajar karena pada akhir-akhir ini masuknya investasi modal asing ke Indonesia relatif lebih banyak yang di tanamkan pada sektor industri dan pertambangan. Mengenai sumbangan dari komoditi migas sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1996, sektor ini mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena sering terjadi naik turunnya harga minyak dipasaran dunia sehingga berpengaruh pula terhadap komposisi nilai ekspor migas Indonesia.

BAB IV

Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series atau data runtut waktu sebanyak 17 observasi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2001, sebagian data diperoleh dari statistik ekonomi keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan indikator ekonomi yang diterbitkan oleh Badan Pusat statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi kredit investasi, produk domestik bruto, inflasi, tingkat bunga dan variabel Dummy.

Tabel 4.1

Data penelitian kurun waktu tahun 1985 sampai dengan tahun 2001

Tahun	KI	PDB	INF	R	DM
1985	928	105879.0	4.31	19.3	0
1986	1268	112120.0	8.83	17.8	0
1987	1657	136288.6	8.90	18.7	0
1988	2184	155165.4	5.47	19.6	0
1989	3174	182550.4	5.97	19.4	0
1990	4085	213574.2	9.53	20.3	1
1991	4845	248874.9	9.52	21.14	1
1992	6330	283770.1	9.94	18.8	1
1993	7460	329775.8	9.77	16.34	1
1994	8401	382219.7	9.24	14.25	1
1995	9055	454514.1	8.64	14.51	1
1996	9713	532568.0	6.47	15.08	1
1997	10802	627695.4	11.05	15.37	1
1998	11731	989611.6	77.63	19.39	1
1999	9145	1109979.5	2.01	20.97	1
2000	6704	1290684.2	9.35	16.35	1
2001	6755	1490975.8	12.55	17.11	1

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Keterangan :

KI : Kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian (miliar Rupiah)

PDB : Produk domestik bruto (miliar Rupiah)

INF : Inflasi (%)

R : Tingkat suku bunga (%)

DM : Variabel Dummy

4.2. Hasil analisa regresi fungsi kredit investasi bank pemerintah pada sektor pertanian.

Dari hasil perhitungan regresi yang dihitung dengan menggunakan program micro TSP, maka didapatkan hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.2

Hasil regresi fungsi kredit investasi bank pemerintah nasional pada sektor pertanian					
	Dependen Variabel KI				
	C	PDB	INF	R	DM
Koefisien	9353.0733	0.0009280	60.742490	-424.36939	4473.9200
Standart Error	3836.3354	0.0011713	26.350259	199.66543	1124.7444
T-statistik	2.4380228	0.7923012	2.3051952*	-2.1254024*	3.9777214*
R ²	0.824261				
Adjusted R ²	0.765681				
F-statistic	14.07074				

Sumber : Lampiran

Sehingga didapatkan diperoleh hasil sebagai berikut :

* signifikan dengan $\alpha = 5\%$

$$KI = 9353.0733 + 0.0009280 \text{ PDB} + 60.742490 \text{ INF} - 424.36939 \text{ R} + 4473.9200 \text{ DM}$$

4.3. Pengujian stasistik

Termasuk dalam pengujian statistik yaitu t-statistik, meliputi meliputi tingkat signifikansi nilai koefisien estimasi secara individu. Uji-f statistik untuk melihat tingkat signifikansi keseluruhan variabel independen dan terhadap variabel dependen dan pengujian koefisien determinasi (R^2). Untuk melihat derajat keeratan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen.

4.3.1. Pengujian koefisien koefisien regresi secara individu (T-test)

1) Pengujian Produk Doimestik Bruto.

Dengan melihat table 4.2 di atas diketahui bahwa Produk Domestik Bruto mempunyai koefisien 0.0009280 dan bertanda positif, sedangkan t-hitungnya sebesar 0.792 ini menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel pada $\alpha = 10\%$ ($0.792 < 1.356$) akan

tetapi variable PDB ini tidak signifikan terhadap kredit investasi terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian.

2) Pengujian suku bunga kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian

Dengan melihat tabel 4.2 diketahui bahwa suku bunga mempunyai koefisien 424.36939 dan bertanda negatif, yang berarti dengan adanya kenaikan satu persen suku bunga kredit investasi akan menyebabkan penurunan kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian sebesar 424.36939 miliar rupiah dengan asumsi variabel yang lainnya tetap. Untuk t-hitung -2.125 ini menunjukkan bahwa t-hitung $>$ t-tabel pada $\alpha = 5\%$ ($-2.125 > 1.782$) yang berarti suku bunga kredit investasi bank secara signifikan terhadap kredit investasi terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian begitu pula sebaliknya.

3) Inflasi

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat inflasi mempunyai koefisien 60.742490 dan bertanda positif, yang berarti dengan adanya kenaikan satu persen tingkat inflasi akan meningkatkan kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian sebesar 60.742490 miliar rupiah, dalam hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada yang berpendapat bahwa dengan tingkat inflasi berhubungan negatif dengan kredit investasi terhadap sektor pertanian dengan anggapan variabel yang lain dianggap tetap. Untuk t-hitung sebesar 2.305 ini menunjukkan bahwa t-hitung $>$ t-tabel pada $\alpha = 2.5\%$ ($2.305 > 2.179$) yang berarti tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian dan begitu pula sebaliknya.

4) Variabel Dummy yaitu Paket 29 Januari 1990 (Pakjan 1990)

Tanda parameter koefisien untuk variabel dummy adalah positif sebesar 4473.9200, yang berarti terdapat peningkatan sebesar 4473.9200 miliar rupiah, sedangkan untuk t -hitung $>$ t -tabel dengan $\alpha = 2.5 \%$ ($3.977 > 2.179$) berarti kebijakan pemerintah (variabel dummy) berpengaruh secara signifikan terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, adanya kebijakan pemerintah 29 Januari 1990 menyebabkan kenaikan atau semakin bertambah jumlah kredit investasi yang disalurkan oleh bank-bank pemerintah pada sektor pertanian.

4.3.2. Pengujian Regresi Secara Keseluruhan (F-Test)

Uji-f ini untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen (pendapatan domestik bruto, inflasi, tingkat suku bunga, variabel dummy) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian (KI). Dari hasil pengujian menunjukkan nilai f -hitung sebesar 14.07074. Sedangkan f -tabelnya dengan $\alpha = 5 \%$ $k-1 = 4$, $n-k=12$, didapat nilai sebesar 3.26. Ini menunjukkan f -hitung $>$ f -tabel ($14.070 > 3.26$), berarti secara bersama-sama variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.3.3. Pengujian Koefisien determinasi majemuk (R^2)

Pengujian dengan determinasi majemuk (R^2) berfungsi untuk mengukur persentase yang diperoleh (R^2) sebesar 0.824261 dapat dikatakan bahwa penggunaan model regresi dapat memberikan hasil yang sangat baik (hampir mendekati angka 1). Dengan kata lain bahwa 0.82 % nilai kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian dipengaruhi oleh variabel yang digunakan dalam model ini, sedangkan faktor-faktor lain yang ada diluar model hanya sebesar 0.18 % saja.

4.4. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yang dapat saja terjadi dimana akan dilihat apakah multikolinier, heteroscedastisitas, dan autokorelasi terdapat dalam model yang digunakan.

4.4.1. Multikolinier

Multikolinier adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya atau dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel independen lainnya.

Pada lampiran dapat dilihat, mengikuti teori dari Klein dimana dilakukan pengujian pada masing-masing variabel independen untuk mengetahui R^2 dari hasil regresi persamaan tersebut.

Dengan menggunakan hasil regresi kredit investasi bank pemerintah pada sektor pertanian yang terdapat pada lampiran diperoleh R^2 sebesar 0.824261 sedangkan nilai R^2 antar variabel independen dengan variabel independen lain pada masing-masing model adalah sebagai berikut :

Variabel	PDB	R	Inf	DM
PDB	-	0.025312	0.090843	0.310184
R	0.025312	-	0.011157	0.096954
Inf	0.090843	0.011157	-	0.096954
DM	0.310184	0.096954	0.096954	-

Sumber: lampiran

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa R^2 dari uji antar variabel independen lebih kecil dari R^2 dari uji keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependennya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan linier antar variabel penjelas yang berarti validnya signivikasi variabel atau tidak terdapat hubungan multikolinier dimasing-masing variabel.

4.4.2. Heteroskedastisitas

Terjadi apabila variabel gangguan mempunyai varian yang sama untuk semua observasi, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji park

Tabel 4.3

Hasil uji park fungsi kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian

Variabel	t-hitung	t-tabel	t-hitung < t-tabel
PDB	1.9278798	2.179	Tidak signifikan
INF	-0.9058997	2.179	Tidak signifikan
R	0.9028284	2.179	Tidak signifikan
DM	0.6105364	2.179	Tidak signifikan

Sumber : Lampiran

Dimana :

Park = nilai absiolut residual R = Suku bunga

PDB = Produk domestik bruto DM = Variabel Dummy

INF = Inflasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ $\alpha = 2.5\%$ ini berarti data diatas variabel PDB, INF, R dan DM tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.4.3. Autokorelasi

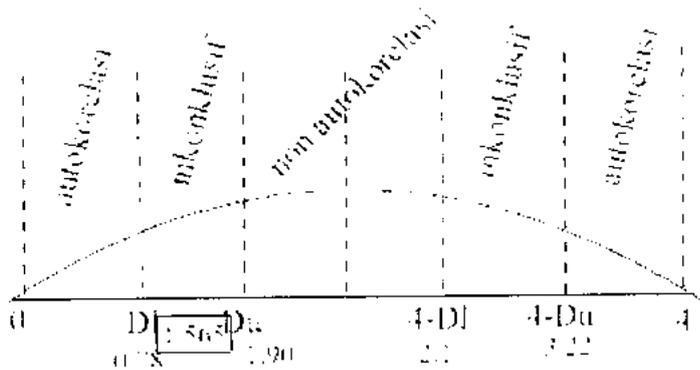
Asumsi ini terjadi apabila ada kesalahan pengganggu suatu periode sebelumnya, untuk menguji terdapat atau tidak autokorelasi dalam penelitian ini digunakan DW-test.

H_0 = tidak terdaopat autokorelasi

H_a = terdapat autokorelasi

Dari hasil pengolahan data dengan Micro TSP (lihat lampiran) diperoleh nilai DW (DW-test) sebesar 1.565388 pada $K=4$ dan $n=17$ dan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh nilai kritis dari persamaan model yaitu :

$$\begin{array}{ll} Du & = 1.90 & 4-Du & = 2.1 \\ DI & = 0.78 & 4-DI & = 3.22 \end{array}$$



Kesimpulan :

Nilai DW-test berada pada daerah keragu-raguan yaitu nilai DW-test sebesar

1.565388, maka uji DW tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inkonklusif).

Untuk nilai-nilai ini tidak terdapat kesimpulan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.

BAB V

Kesimpulan dan Implikasi

6. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu (Produk domestik bruto, tingkat inflasi, tingkat suku bunga investasi, variabel dummy) memberikan pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian.
2. Variabel independen produk domestik bruto tidak signifikan terhadap variabel dependen kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, artinya variabel produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian. Hal ini pemerintah memberi kebijakan kemudahan kredit dari sektor perbankan khususnya bank pemerintah untuk memberikan kredit investasi terhadap sektor pertanian, tanpa melihat besarnya produk domestik bruto pertahunnya.
3. Variabel independen tingkat inflasi terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, dan ini bertentangan dengan hasil hipotesa, dengan naiknya satu persen tingkat inflasi akan meningkatkan kredit investasi 60,74 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah cenderung untuk memberikan kredit investasi terhadap sektor pertanian, meskipun tingkat inflasi cenderung naik setiap tahunnya.

4. Variabel independen tingkat suku bunga kredit investasi terdapat hubungan signifikan dan negatif terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, hasil ini sesuai dengan hipotesa. dengan naiknya tingkat suku bunga kredit satu persen maka akan menurunkan penyaluran kredit investasi 424.3 miliar Rupiah terhadap sektor pertanian.
5. Variabel independen dummy Terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian. Hal ini menggambarkan bahwa setelah adanya Paket Kebijakan 29 Januari 1990 mampu mempengaruhi dan meningkatkan kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian.

6.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka sehubungan dengan pemberian kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, disampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Dalam pemberian atau penyaluran kredit investasi bank pemerintah terhadap sektor pertanian, hendaknya memperhatikan masalah tingkat bunga investasi. Sehingga dengan tingkat suku bunga kredit investasi itu rendah, akan lebih banyak petani yang akan mengembangkan pertaniannya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh produsen, dengan memanfaatkan dana perbankan ini secara maksimal diharapkan nantinya produksi akan meningkat. peningkatan produksi akan meningkatkan pula kesejahteraan tenaga kerja (upah, tunjangan kerja, kesejahteraan).
- 2) Peranan kebijakan bank pemerintah nasional dalam hal per kreditan sangat diharapkan. hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui paket kebijakan 29 Januari 1990 yang intinya adalah, program pemberian kredit

likuiditas dari bank sentral untuk pembiayaan kredit program seperti pengadaan pangan dan pertanian. Kebijakan ini mempunyai implikasi yang positif terhadap pemberian kredit pada sektor pertanian, dan diharapkan kebijakan ini akan mampu meningkatkan penyaluran kredit investasi secara umum, dan khususnya penyaluran kredit investasi bank pemerintah nasional terhadap sektor pertanian dan pelaksanaannya dapat diteruskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subagya, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kredit*, Skripsi Mahasiswa, 1997
- Boediono, *Ekonomi Moneter* Edisi 3 BPFÉ, Hal 82, Yogyakarta 1992.
- Damodar Gujarati, *Ekonometri Dasar*, Edisi Ke 4 Penerbit Air Langga 1998
- Investasi bank-bank pemerintah Indonesia pada sektor industri paska paket Januari 1990, tahun 1997.
- Insukindro, *Ekonomi Uang Dan Bank*, BPFÉ, Hal 48, Yogyakarta.
- Jangker Sihombing, *Pengantar Fund Manajemen untuk Perbankan Indonesia*, Hal 31, 1990.
- Laporan perekonomian Indonesia 1996 BPS Jakarta 1996
- M Sinungun, *Manajemen Dan Bank*, Bina Aksara, Hal 3, Jakarta 1990.
- Majidi Nasyith, *Kebijakan Paket Januari 1990*, Penghapusan Dualisme Ekonomi.
- Nota keuangan dan RAPBN 1997/1998
- Prisma Edisi II, LP3ES, Hal 25, Jakarta 1991.
- Republik Indonesia UU No 7 pasal 3 dan 4 tahun 1992
- Sadono Sukirno *Teori Makro Ekonomi*, PT Raya Grafindo Persada, Edisi 2 1995.
- Soediyono R. *Ekonomi Makro Analisis IS-LM*, Liberti, Hal 172, Yogyakarta.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, SFE Perbannas dan Gramedia, Hal 11, Jakarta 1992.
- Thomas Suyatno DKK, *Kelengkapan Perbankan*, Edisi Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Hal 12, Jakarta 1996.
- Yulianto, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tahun 1997.

Year	RI	FDB	INF	B	LM
1985	928.0000	105879.0	4.310000	19.28000	0.000000
1986	1169.000	112170.9	8.830000	17.80000	0.000000
1987	1657.000	136288.6	8.900000	13.79000	0.000000
1988	2184.000	155165.4	5.470000	12.60000	0.000000
1989	3174.000	182550.4	5.970000	19.46000	0.000000
1990	4085.000	213574.2	9.530000	20.30000	1.000000
1991	4845.000	248874.9	9.520000	21.14000	1.000000
1992	6330.000	283770.1	9.940000	18.80000	1.000000
1993	7460.000	329775.8	9.770000	16.34000	1.000000
1994	8491.000	382219.7	9.240000	14.25000	1.000000
1995	9055.000	454514.1	8.640000	14.51000	1.000000
1996	9713.000	532568.0	6.430000	15.08000	1.000000
1997	10802.00	627695.4	11.05000	15.37000	1.000000
1998	11731.00	989611.6	77.63000	19.39000	1.000000
1999	9145.000	1109979.	2.010000	20.97000	1.000000
2000	6704.000	1290684.	9.350000	16.35000	1.000000
2001	6755.000	1490975.	12.55000	17.11000	1.000000

LS // Dependent Variable: Y
 Model: Y = a + bX + c
 OLS Range: 1981 - 1991
 Number of observations: 11

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	9353.0733	3836.3354	2.4380228	0.0313
PDB	0.0009280	0.0011713	0.7923012	0.4436
INF	60.742460	26.350259	2.3051952	0.0398
R	-424.36939	199.66543	-2.1254024	0.0550
DM	4473.9200	1104.7444	3.9777214	0.0019

R-squared	0.824261	Mean of dependent var	6131.568
Adjusted R-squared	0.765681	S.D. of dependent var	3166.072
S.E. of regression	1677.805	Sum of squared resid	33780372
Log likelihood	-147.3905	F-statistic	14.09074
Durbin-Watson stat	1.565388	Prob(F-statistic)	0.000175

=====
 Coefficient Covariance Matrix
 =====

C, C	14717469	C, PDB	-0.250142
C, INF	15069.54	C, R	-750024.9
C, DM	-1669919.	PDB, PDB	1.37E-06
PDB, INF	-0.006850	PDB, R	0.005703
PDB, DM	-0.656578	INF, INF	694.3362
INF, R	-990.0215	INF, DM	-3402.228
R, R	39866.29	R, DM	64375.79
DM, DM	1265050.		

=====
 Individual Plot
 =====

Y	obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1985	1	-5041.61	6081.00	11111.61
1986	2	-11711.70	11891.00	23602.70
1987	3	-4771.45	14521.00	19749.55
1988	4	871.309	11841.00	11111.69
1989	5	1511.65	31241.00	16511.35
1990	6	-1224.37	40051.00	38826.63
1991	7	-220.054	48451.00	48251.05
1992	8	385.974	62301.00	62715.97
1993	9	-1121.00	74601.00	73479.00
1994	10	-2341.64	84011.00	81669.36
1995	11	438.894	93501.00	93940.11
1996	12	1758.20	10131.00	10306.20
1997	13	1264.85	10801.00	10965.85
1998	14	498.711	11731.00	11232.71
1999	15	2069.86	11451.00	11660.86

LS // Dependent Variable: INF
 Date: 11/01/99 2:01pm 7/0
 SMPL range: 1985 - 1991
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	412310.97	131698.61	3.1307161	0.0069
INF	7825.5998	6392.1279	1.2242556	0.2397

R-squared	0.590843	Mean of dependent var	508602.7
Adjusted R-squared	0.530133	S.D. of dependent var	442270.1
S.E. of regression	4355.3314	Sum of squared resid	3.89E+12
Log likelihood	-243.7916	F-statistic	1.498802
Durbin-Watson stat	0.213697	Prob(F-statistic)	0.239737

Coefficient Covariance Matrix

C,C	1.73E+10	C,INF	-5.03E+08
INF,INF	40859300		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	:		:	1985	-340160.	105879.	446039.
	:		:	1986	-369291.	112120.	461411.
	:		:	1987	-345670.	136289.	481959.
	:		:	1988	-299952.	155165.	455117.
	:		:	1989	-276479.	182556.	459030.
	:		:	1990	-272315.	213574.	486689.
	:		:	1991	-237936.	148875.	456811.
	:		:	1992	204327.	282777.	490190.
	:		:	1993	-188991.	319776.	488767.
	:		:	1994	-164091.	360000.	484610.
	:		:	1995	254101.	404014.	479324.
	:		:	1996	498751.	530067.	460943.
	:		:	1997	198911.	670095.	498784.
	:		:	1998	327000.	828121.	501981.
	:		:	1999	687939.	1100079.	476646.
	:		:	2000	886136.	1299004.	483489.
	:		:	2001	930184.	1498910.	518521.

LS // Dependent Variable is FIB
 Date: 2009/07/21 Time: 11:29
 SMPN range: 1985 - 2001
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	1068077.2	903374.46	1.1825409	0.2554
R	-31255.433	50978.488	-0.6241289	0.5419
R-squared	0.015310	Mean of dependent var		50860.7
Adjusted R-squared	-0.039667	S.D. of dependent var		44270.1
S.E. of regression	450956.6	Sum of squared resid		3.09E+10
Log likelihood	-244.3832	F-statistic		0.389537
Durbin-Watson stat	0.118500	Prob(F-statistic)		0.541919

=====
 Coefficient Covariance Matrix
 =====

C,C	8.16E+11	C,R	-4.49E+10
R,R	2.51E+09		

=====
 Residual Plot
 =====

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1985	-359168.	105879.	465047.
1986	-399810.	112120.	511930.
1987	-347512.	136289.	493801.
1988	-300505.	155165.	450671.
1989	-279371.	192850.	461910.
1990	-216010.	213073.	433782.
1991	-192866.	245113.	410177.
1992	-166811.	283771.	431671.
1993	-117704.	313330.	501484.
1994	-116611.	350111.	511357.
1995	161111.	114511.	614711.
1996	-43373.	501511.	591535.
1997	-441911.	-17000.	317581.
1998	111311.	300111.	481134.
1999	147103.	110587.	410481.
2000	103411.	110584.	511131.
2001	100478.	110585.	511137.

EQ // Dependent Variable is FPI
 Date: 2010-07-28 Time: 7:46
 SMPL range: 1985 - 2001
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	138400.68	169661.54	0.8157458	0.4274
DM	524452.02	201937.62	2.5971031	0.0102
R-squared	0.310184	Mean of dependent var	508602.7	
Adjusted R-squared	0.264197	S.D. of dependent var	492270.1	
S.E. of regression	379374.7	Sum of squared resid	1.16E+12	
Log likelihood	-241.4448	F-statistic	6.744945	
Durbin-Watson stat	0.277499	Prob(F-statistic)	0.020215	

=====
 Coefficient Covariance Matrix
 =====

C,C	2.88E+10	C,DM	-2.88E+10
DM,DM	4.08E+10		

=====

=====
 Residual Plot
 =====

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1985	-32521.7	103879.	138401.
1986	-26280.7	112120.	138401.
1987	-2112.09	136289.	138401.
1988	10764.7	155105.	138401.
1989	44149.7	190550.	138401.
1990	449279.	215574.	662004.
1991	417874.	240875.	662004.
1992	174563.	266176.	662004.
1993	433679.	301477.	662004.
1994	30004.	326778.	662004.
1995	-109333.	352079.	662004.
1996	-130768.	377380.	662004.
1997	-315811.	402681.	662004.
1998	16009.	427982.	662004.
1999	437136.	453283.	662004.
2000	677321.	478584.	662004.
2001	413711.	503885.	662004.

=====

LS // Dependent Variable is INF
 Date: 05-16-2003 / Time: 7:48
 SMPLE range: 1985 - 2001
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	6.6959998	7.4765217	0.8702700	0.3968
DM	7.9456667	9.1368884	0.8696250	0.3982
R-squared	0.047997	Mean of dependent var	12.30471	
Adjusted R-squared	-0.015470	S.D. of dependent var	17.03357	
S.E. of regression	17.16520	Sum of squared resid	4419.674	
Log likelihood	-71.38712	F-statistic	0.756248	
Durbin-Watson stat	2.329043	Prob(F-statistic)	0.398208	

=====
 Coefficient Covariance Matrix
 =====

C,C	58.92899	C,DM	-58.92899
DM,DM	83.48273		

Residual Plot	obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
: + :	1985	-2.38600	4.31000	6.69600
: - :	1986	2.13400	8.83000	6.69600
: + :	1987	3.20400	8.90000	6.69600
: + :	1988	-1.22600	5.47000	6.69600
: + :	1989	-0.72600	8.82600	6.69600
: + :	1990	-0.11867	8.93600	14.6417
: + :	1991	-0.11867	8.93600	14.6417
: + :	1992	-1.20167	8.84600	14.6417
: + :	1993	-4.82167	8.77600	14.6417
: + :	1994	-0.16167	8.94600	14.6417
: + :	1995	-6.00167	8.64600	14.6417
: + :	1996	-0.17167	8.94600	14.6417
: + :	1997	-3.59167	11.75600	14.6417
: :	1998	-0.38999	7.75600	14.6417
: + :	1999	-1.16317	7.94600	14.6417
: + :	2000	-5.129167	8.85600	14.6417
: + :	2001	-1.19167	11.75600	14.6417

LS // Dependent Variable in P
 Date: 11/11/12 Time: 7:47
 SMPLE range: 1985 2001
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	18.960000	0.9881161	19.188029	0.0000
DM	-1.4925000	1.1760934	-1.2690319	0.2238

R-squared	0.096954	Mean of dependent var	17.90647
Adjusted R-squared	0.036750	S.D. of dependent var	2.251249
S.E. of regression	0.209495	Sum of squared resid	73.22801
Log likelihood	-36.53505	F-statistic	1.610447
Durbin-Watson stat	0.918915	Prob(F-statistic)	0.223769

=====
 Coefficient Covariance Matrix
 =====

C,C	0.976373	C,DM	-0.976373
DM,DM	1.383196		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	:	*	:	1985	0.34000	19.3000	18.9600
	:		:	1986	-1.16000	17.8000	18.9600
	:	*	:	1987	-0.26000	18.7000	18.9600
:	:		:	1988	0.64000	19.6000	18.9600
:	:	*	:	1989	0.44000	19.4000	18.9600
:	:		:	1990	0.83000	20.3000	18.9600
:	:		:	1991	3.63000	21.1400	18.9600
:	:		:	1992	1.33000	19.0000	18.9600
:	:	*	:	1993	-1.12750	16.3400	18.9600
:	:		:	1994	-0.12750	14.7800	18.9600
:	:		:	1995	1.95750	14.5100	18.9600
:	:		:	1996	-1.26750	15.2900	18.9600
:	:		:	1997	-2.00750	15.0700	18.9600
:	:		:	1998	1.62250	16.1900	18.9600
:	:		:	1999	3.50750	21.2700	18.9600
:	:		:	2000	-1.11750	16.3700	18.9600
:	:		:	2001	0.35750	17.1100	18.9600

LS // dependent Variable: INF
 date: 2010-01-27 11:16
 RMR range: 1985 2001
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	17.734700	0.6991358	25.366604	0.0000
INF	0.0139597	0.0339333	0.4113872	0.6866
R-squared	0.011157	Mean of dependent var	17.90647	
Adjusted R-squared	-0.054766	S.D. of dependent var	2.251249	
S.E. of regression	2.312074	Sum of squared resid	80.18527	
Log likelihood	-37.30653	F-statistic	0.164239	
Durbin-Watson stat	0.764441	Prob(F-statistic)	0.686606	

Coefficient Covariance Matrix

C,C	0.488791	C,INF	-0.014168
INF,INF	0.001151		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1985	1.50513	19.3000	17.7949
1986	-0.05797	17.8000	17.8580
1987	0.64106	18.7000	17.8589
1988	1.78904	19.6000	17.8111
1989	1.58196	19.4000	17.8180
1990	2.43226	20.3000	17.8677
1991	3.07340	21.1400	17.8676
1992	3.92654	21.9700	17.8735
1993	-1.58109	19.3400	17.8711
1994	-3.61369	18.2500	17.8627
1995	-3.74531	18.5100	17.8557
1996	-2.74500	15.8000	17.8320
1997	-2.51896	15.3700	17.8090
1998	0.57161	19.7000	18.0194
1999	3.07724	20.9700	17.7679
2000	-1.61502	16.3500	17.8652
2001	0.78989	17.1100	17.9039

Date: 3-05-2003 / Time: 9:32
 SMPL range: 1985 - 2001
 Number of observations: 17

Variable	Mean	S.D.	Maximum	Minimum
PDB	508602.67	442270.08	1490975.0	105879.00
INF	17.304706	17.033971	77.630000	2.0100000
R	17.906470	2.2512492	21.140000	14.250000
DM	0.7058824	0.4696682	1.0000000	0.0000000

	Covariance	Correlation
PDB, PDB	1.841E+11	1.0000000
PDB, INF	2137078.5	0.3014019
PDB, R	-149088.36	-0.1590968
PDB, DM	108882.94	0.5569421
INF, INF	273.08815	1.0000000
INF, R	3.8122325	0.1056255
INF, DM	1.6496194	0.2190815
R, R	4.7699982	1.0000000
R, DM	-0.3098616	-0.3113737
DM, DM	0.2076125	1.0000000

LS // Dependent Variable is LUK
 Date: 3-05-2003 / Time: 9:37
 SMPL range: 1985 - 2001
 Number of observations: 17

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-6.5970852	5.1727434	-1.2753552	0.2263
PDB	3.045E-06	1.579E-06	1.9278798	0.0779
INF	-0.0321862	0.0355295	-0.9058997	0.3828
R	0.2430594	0.2692200	0.9028284	0.3844
DM	0.9259122	1.5165552	0.6105364	0.5529
R-squared	0.370505	Mean of dependent var		-0.438639
Adjusted R-squared	0.160674	S.D. of dependent var		2.469338
S.E. of regression	2.262278	Sum of squared resid		61.41482
Log likelihood	-35.03968	F-statistic		1.765726
Durbin-Watson stat	2.969376	Prob(F-statistic)		0.200547

Coefficient Covariance Matrix

C, C	26.75727	C, PDB	-4.58E-07
C, INF	0.027397	C, R	-1.363592
C, DM	-3.036017	PDB, PDB	2.49E-12
PDB, INF	-1.25E-08	PDB, R	1.04E-08
PDB, DM	-1.19E-06	INF, INF	0.001262
INF, R	-0.001800	INF, DM	-0.006185
R, R	0.072479	R, DM	0.117039
DM, DM	2.299940		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1985	0.79906	-0.92332	-1.72239
1986	-2.04373	-4.25718	-2.21345
1987	-0.16439	-2.08776	-1.92337
1988	0.12319	-1.41355	-1.53674
1989	1.28586	-0.23220	-1.51806
1990	2.20067	1.80714	-0.39352
1991	-2.16641	-2.24796	-0.08155
1992	1.05874	0.70116	-0.55758
1993	-2.73009	-3.74004	-1.00996
1994	2.01375	0.67253	-1.34121
1995	2.51542	1.47683	-1.03859
1996	-4.74649	-5.33903	-0.59255
1997	1.72577	1.34594	-0.37983
1998	-0.12480	-0.56855	-0.44375
1999	-0.05272	2.68797	